



Kebijakan PNG Solutions dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Periode Kevin Rudd

Rolas Sauriana Tamba

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Australia is a country that has ratified the 1951 Refugee Convention. However, during the regime of Prime Minister Kevin Rudd in 2013, Kevin Rudd released a tough policy against refugees and asylum seekers who came to Australia called the PNG Solution policy. PNG Solution is a policy provide that every refugee and asylum seeker arriving without a passport or visa, using a ship, will not resettle in Australia. They will be resettled in Papua New Guinea. This research will explain, the reasons of Australia, create the PNG Solutions policy, against refugees and asylum seekers in Australia. Qualitative research method, with explanative type, used in this research to discuss the policy of PNG Solution and the factors drive in determining the policy. Meanwhile, the concept used to explain in this research is concept of Foreign Policy Analysis, that is Internal and External Setting from Richard Synder, Bruck and Sapin. Data were collected using official government literature and archive studies. The results show that, internal factors are Labors Party, the situational characteristics of Australia, and public opinion is more dominant in Australian foreign policy. Meanwhile, the external factors, have no influence in decision making.

Keywords: *refugees, asylum seekers, PNG Solutions*

Pendahuluan

Sejak abad ke-19, Australia menjadi negara tujuan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Sampai sekarang pun, Australia tetap diminati sebagai tempat perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk mencapai tujuan mereka, karena Australia memiliki tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi. Berdasarkan data dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) sampai 30 Juli 2015 sudah ada sebanyak 70.497 pengungsi dan pencari suaka di Australia.

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia, berbagai kebijakan pun ditetapkan oleh Pemerintah Australia. Di masa pemerintahan periode ke-II, Kevin Rudd mengumumkan kebijakan Penataan Pemukiman Daerah (*Regional Resettlement Arrangement*). Papua New Guinea Solution (PNG Solution) merupakan bentuk pelaksanaan dari kebijakan Regional Resettlement Arrangement yang telah disetujui oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Papua New Guinea. Kebijakan ini menerangkan bahwa setiap pendatang, baik pengungsi maupun pencari suaka yang datang tanpa paspor atau visa dengan menggunakan kapal, tidak akan memiliki peluang untuk tinggal di Australia. Mereka akan langsung dikirimkan ke negara terdekat, yaitu Papua Nugini. Pencari suaka yang sudah ada di Pulau Manus dan Nauru akan di pindah ke Australia untuk diproses di wilayah Australia. Sementara itu, semua pendatang baru

dengan perahu akan ditransfer ke Papua Nugini dan Nauru, dengan perempuan dan keluarga serta anak-anak (Amnesty Internasional Publications 2013).

Australia memiliki sejumlah kewajiban hukum internasional sehubungan dengan pencari suaka dan pengungsi, di bawah Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, Protokol 1967, dan perjanjian hak asasi manusia lainnya, yang tidak ditandatangani atau baru ditandatangani oleh PNG dan Nauru. Kewajiban ini adalah perlindungan pengungsi yang mencari suaka, jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental bagi pengungsi tanpa adanya diskriminasi ataupun hukuman (Archbold 2015, p. 1). Dengan demikian, dalam pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing negara, baik Australia maupun Papua New Guinea, memiliki kewajiban hukum internasional yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, ada potensi besar untuk pelanggaran kewajiban yang harus dimiliki Australia bagi pengungsi dan pencari suaka yang sedang diproses atau dimukimkan kembali di PNG atau Nauru (Archbold 2015, p. 11). Meskipun Papua New Guinea telah menyetujui beberapa kewajiban, kemampuan untuk secara efektif menjunjung kewajiban-kewajiban ini dalam sistem domestik mereka dipertanyakan (Archbold 2015, p. 12).

Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, melarang negara-negara menerapkan hukuman pada pencari suaka yang masuk tanpa paspor atau visa. Hal ini karena, para pencari suaka tersebut tidak mungkin untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Pencari suaka tidak bisa mengajukan visa perlindungan sebelum meninggalkan negara mereka (McAdam 2013, p. 438). Kebijakan PNG Solution ini menunjukkan bahwa, Australia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, karena kebijakan PNG Solution tersebut tidak sesuai dengan isi Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Di bawah kebijakan PNG Solution, semua pendatang, baik pengungsi maupun pencari suaka yang datang tanpa membawa paspor atau visa resmi dengan menggunakan kapal, akan langsung dikirimkan ke Papua New Guinea dan tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di Australia. Tidak hanya itu, kebijakan pengolahan lepas pantai (*offshore processing*) tidak melewati prosedural suaka tertentu. Pemukiman kembali di lepas pantai seperti di PNG dan Nauru, para pengungsi akan menghadapi masa depan dengan standar perlindungan hak asasi yang lebih rendah daripada apa yang akan mereka dapatkan jika mereka dipindahkan ke Australia, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan kesejahteraan (Archbold 2015, p. 11).

Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951, sudah seharusnya, Australia melaksanakan kewajibannya dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia, tanpa mempertimbangkan kewajibannya kepada negara ketiga yang kurang mampu memberikan solusi. Papua Nugini jelas merupakan negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi, masalah kekerasan yang serius, khususnya terhadap perempuan dan intoleransi terhadap orang luar. Namun demikian, Australia tetap melaksanakan perjanjian dengan Papua Nugini (Amnesty Internasional Publications 2013, p. 3).

Alasan dalam penetapan kebijakan PNG Solution ini dianalisis dengan menggunakan konsep *Foreign Policy Analysis* dari Richard C. Snyder, H.W. Bruck dan Burton Sapin, yang mengemukakan bahwa, internal dan eksternal setting mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Nilai dalam kebijakan luar negeri berasal dari adanya interaksi antara setting internal dan setting eksternal (Stevenson 2000, p.71).

Pembahasan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka

Faktor pertama yang mempengaruhi pengambilan kebijakan PNG Solution adalah perspektif aktor, yaitu Kevin Rudd dan pemerintahannya terhadap pengungsi dan pencari suaka, yang dipengaruhi oleh *Australian Labor's Party* (Partai Buruh) sebagai Partai Pendukung Kevin Rudd. Pada masa pemerintahan Kevin Rudd, yaitu Parlemen Australia yang ke-43, Partai Buruh memenangkan perolehan mayoritas suara dengan perolehan sebanyak 72 kursi dalam *House of Representatives*. Posisi Partai Buruh yang lebih besar dibanding partai lainnya, mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan yang diambil oleh Parlemen Australia. Namun demikian, karena sistem pemerintahan yang dianut Australia adalah *Western Parliamentary*, maka peran Koalisi Oposisi yang dipimpin oleh Partai Liberal, juga tidak dapat dikesampingkan. Segala perundang-undangan dan kebijakan yang disusun oleh pemerintah eksekutif, dalam hal ini adalah Partai Buruh, harus dipertanggung jawabkan dalam sesi *Question Time* di Parlemen dan dievaluasi langsung oleh koalisi oposisi yang bertindak sebagai *Shadow Cabinet* (Herdianzah 2013, p. 11).

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, Partai Buruh yang diwakili oleh Perdana Menteri Kevin Rudd mengeluarkan kebijakan baru yaitu PNG Solution sebagai suatu kebijakan yang “*hard-line*” (BBC News 2013). Sesuai dengan *National Platform* Partai Buruh menerangkan bahwa, Partai Buruh mengakui resiko terhadap kehidupan orang yang pergi meninggalkan negaranya dengan menggunakan perahu tidaklah aman, tidak layak huni, dan penuh sesak, yang juga seringkali dipengaruhi sindikat kriminal. Oleh sebab itu, Partai Buruh mendukung langkah-langkah untuk mengurangi resiko perjalanan tersebut dengan bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan UNHCR untuk mengurangi pengaruh dari para penyelundup manusia terhadap orang-orang yang rentan diselundupkan (Labor's National Platform, p. 143). Tidak hanya itu, Pemerintahan Australia dibawah pimpinan Partai Buruh tentang Perbatasan Australia, akan mempertahankan langkah-langkah keamanan perbatasan untuk mendukung pemrosesan migrasi secara teratur dan melindungi kepentingan nasional dan perbatasan Australia (Labor's National Platform, p. 144).

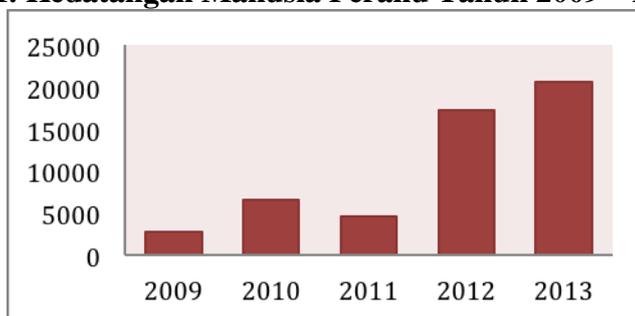
Kebijakan PNG Solution tersebut merupakan usaha dari Kevin Rudd untuk melindungi kepentingan nasional dan perbatasan Australia dengan membuat suatu kebijakan pemrosesan migrasi yang teratur. Tidak hanya itu, kebijakan PNG Solution juga menjadi upaya dari Kevin Rudd untuk mengurangi resiko dari adanya aktivitas penyelundupan manusia terhadap pendatang yang hendak datang ke Australia, dan kebijakan PNG Solution ini sesuai dengan isi National Platform Partai Buruh. Posisi Partai Buruh yang besar di Parlemen Australia, maka dalam menetapkan kebijakan, akan sesuai dengan National Platforms Partai Buruh. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan PNG Solution.

Selain itu, kebijakan PNG Solution ini ditetapkan sebagai salah satu strategi Partai Buruh untuk memenangkan pemilihan federal yang akan dilaksanakan pada September 2013. Berdasarkan survei yang dilakukan, untuk menilai signifikansi isu dalam pemilihan federal tahun 2013, menemukan bahwa, isu ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan menduduki peringkat pertama. Isu kependudukan, suaka, dan lingkungan berada di peringkat kedua (Marcus 2013). Isu pengungsi dan pencari suaka masih terus menjadi perhatian khusus dalam pemilihan umum federal untuk memilih perdana menteri Australia. Kevin Rudd menggunakan kebijakan baru ini untuk mencoba mengatasi kerentanan politik utama menjelang pemilihan federal (Crowe & Callick 2013).

Karakteristik Situasional Australia dalam Pengambilan Kebijakan

Richard Synder, Bruck dan Sapin menyatakan bahwa, karakteristik situasional Australia perlu dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Demikian halnya dengan kebijakan PNG Solution. Semenjak meningginya konflik internal dalam negara, seperti *Arab Spring* di negara-negara Timur Tengah, konflik sisa demokratisasi di Afghanistan, konflik sektarian di Kamboja, serta konflik-konflik internal lainnya, menyebabkan orang-orang dalam negara tersebut merasa terancam keamanannya. Dalam kondisi demikian, fenomena migrasi internasional tidak dapat dicegah dan secara bersamaan menyebabkan arus *irreguler maritime arrivals* (IMAs) yang sangat besar bagi Australia. Jumlah pencari suaka yang datang menggunakan perahu terus meningkat setiap tahunnya semenjak konflik-konflik tersebut bermunculan (Maajid 2015, p. 47). Berikut data kedatangan manusia perahu dari tahun 2009 sampai tahun 2013:

Diagram 1. Kedatangan Manusia Perahu Tahun 2009 - Tahun 2013

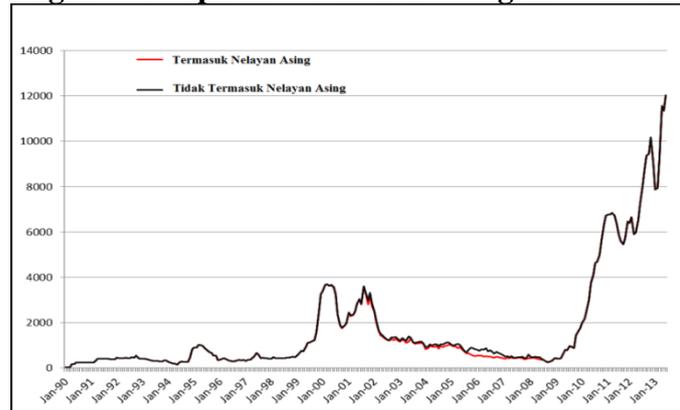


Sumber: Customs and Border Protection, Department of Parliamentary Services, Parliament Australia, 2014.

Dapat dilihat dari diagram tersebut, jumlah kedatangan pencari suaka ke Australia pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010. Namun pada tahun 2012, mengalami peningkatan yang cukup pesat, dengan jumlah sebesar 17.204 orang. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali, meskipun jumlahnya tidak sebesar jumlah kedatangan dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Selanjutnya, keadaan fasilitas penahanan imigrasi Australia juga perlu untuk dijelaskan. Terdapat sejumlah 9.256 orang di fasilitas penahanan imigrasi dan tempat penahanan alternatif, termasuk 6.743 orang yang ditahan di imigrasi yang berada di daratan Australia dan 2.531 orang di tempat penahanan imigrasi di Pulau Christmas pada 30 Juni 2013. Secara terpisah, sebanyak 2.771 orang telah disetujui untuk tinggal bersama dengan masyarakat Australia (Department of Immigration and Citizenship 2013, p. 3). Berikut grafik populasi pada penahanan imigrasi Australia:

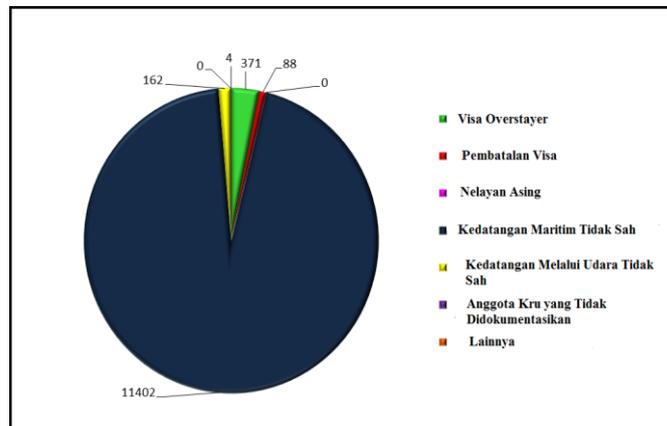
Diagram 2. Populasi Penahanan Imigrasi Australia



Sumber: diolah dari Department of Immigration and Citizenship, 2013.

Jumlah orang yang berada dalam tahanan imigrasi terus bertambah, terutama karena perubahan pola kedatangan maritim yang tidak sah. Jumlah kedatangan maritim yang tidak sah pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013 turun dibandingkan dengan 11 bulan sebelumnya. Kedatangan sejak Februari 2013 telah meningkat dan menyebabkan tingginya jumlah orang yang berada dalam tahanan imigrasi (Department of Immigration and Citizenship 2013, p. 4).

Diagram 3. Populasi dalam Penahanan Imigrasi Menurut Jenis Kedatangan



Sumber: diolah dari Department of Immigration and Citizenship, 2013.

Berdasarkan data di atas, jumlah orang yang berada dalam tahanan imigrasi yang tiba secara tidak sah melalui udara atau kapal pada 30 Juni 2013 adalah sebanyak 11.568 orang. Ini mewakili sekitar 96% dari total populasi penahanan imigrasi. Sekitar 459 orang (4% dari total populasi imigrasi) yang tiba di Australia secara sah dan kemudian dibawa ke tahanan imigrasi untuk menjalani masa *overstay* atau melanggar persyaratan visa mereka (Department of Immigration and Citizenship 2013, p. 5).

Selanjutnya, membahas kejadian yang terjadi terkait pencari suaka yang mencoba masuk ke wilayah Australia. Selama periode 2001 sampai Juni 2013 ada sebanyak 964 orang pencari suaka dan awak kapal yang hilang di laut dan sejak Oktober 2009, 604 orang kehilangan nyawa mereka (Archbold 2015, p. 16). Pada Maret tahun 2013, sebuah kapal terbalik sekitar 14 mil laut di barat Pulau Christmas, yang sering dijadikan sebagai tujuan

pencari suaka. Dua orang tewas dan dua lainnya terluka parah setelah kapal yang membawa sedikitnya 95 pencari suaka terbalik di perairan Australia (BBC Indonesia 2013).

Pada Mei tahun 2013, sebuah perahu yang diduga membawa 66 orang pencari suaka dari Sri Lanka berhasil mencapai daratan Australia tanpa terdeteksi. Perahu tersebut adalah perahu kedua yang ditumpangi pencari suaka yang mencapai daratan Australia dalam lima tahun terakhir (Mercer 2013).

Pada 17 Juli tahun 2013, Angkatan Laut Australia menyelamatkan satu kapal pencari suaka yang mengangkut 120 orang, setelah kapal tersebut mengalami kesulitan di dekat Christmas Island. Sehari sebelumnya, empat orang mati tenggelam ketika kapal mereka terbalik. Para pejabat imigrasi mengatakan itu adalah kasus yang tidak biasa. Penyelidikan sedang berlangsung untuk mengetahui apakah Australia perlu mengubah cara melakukan patroli perbatasan di Samudera Hindia yang mengelilingi pantai barat laut Australia. Sementara itu, Partai Konservatif yang beroposisi menuduh Partai Buruh kehilangan kontrol terhadap perbatasan negara. Anggota oposisi di parlemen mengatakan kedatangan perahu itu adalah bencana bagi strategi pengawalan perbatasan negara. Mereka bersikeras garis pantai barat laut Australia yang luas itu sangat buruk pengamanannya dan memperkirakan akan ada lagi perahu pencari suaka mencoba masuk mencapai daratan di sana (ABC Radio Australia 2013). Pada 18 Juli 2013, Rudd mengatakan akan memperketat undang-undang pemrosesan pengungsi dan mungkin akan meminta perubahan pada Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 (ABC Radio Australia 2013).

Gelombang kedatangan pencari suaka yang tinggi, jumlah orang yang berada dalam tahanan imigrasi yang terus bertambah dan bencana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Pemerintah Australia dibawah pemerintahan Kevin Rudd, mengupayakan sebuah kebijakan yang bertujuan menghalangi kenaikan jumlah pencari suaka yang datang ke Australia dengan kapal nelayan dari negara asalnya. Hal inilah yang menyebabkan, ditetapkannya kebijakan PNG Solution sebagai upaya untuk mencegah kenaikan jumlah pencari suaka. Kebijakan ini juga bertujuan memberikan pencegahan sedemikian rupa, sehingga pencari suaka berhenti mencoba untuk datang ke Australia.

Formasi Opini Publik Australia Tentang Pengungsi dan Pencari Suaka

Di Australia, terdapat perbedaan persepsi antara pengungsi dan pencari suaka (Hartley & Pedersen 2015, p. 14). Sikap masyarakat terhadap pencari suaka sebagian besar negatif. Survei yang dilakukan terhadap 2.000 anggota masyarakat Australia ditemukan bahwa 75% lebih bersifat positif terhadap pengungsi yang ditempatkan kembali dibanding dengan pencari suaka yang datang dengan kapal (Hartley & Pedersen 2015, p. 3). Tingkat prasangka, ancaman, ketakutan dan kemarahan terhadap pencari suaka lebih tinggi dibandingkan terhadap pengungsi. Dan masyarakat lebih memilih kebijakan yang ketat untuk pencari suaka daripada untuk pengungsi yang baru saja pindah tempat tinggal (Hartley & Pedersen 2015, p. 4). Persepsi ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang telah dilakukan The Australian Institute dan Research Now.

Berdasarkan jajak pendapat ini, ditemukan sebanyak 22% responden mendukung posisi kedua Partai Koalisi dan Partai Buruh, bahwa setiap pencari suaka yang tiba di Australia dengan kapal tidak boleh diijinkan datang ke Australia dalam kondisi apapun. Sebanyak 35% mengatakan bahwa pencari suaka harus dikirim ke kamp-kamp di luar negeri untuk diproses, namun yang ditemukan sebagai pengungsi harus dipindahkan ke Australia, dan mereka yang tidak memiliki klaim perlindungan yang sah kembali ke negara asalnya. Dan dari temuan jajak pendapat tersebut, sebanyak 28% menentang kebijakan Australia mengenai pemrosesan lepas pantai dan pemukiman kembali wilayah untuk pengungsi yang datang dengan menggunakan kapal. Mereka berpendapat, pencari suaka

harus dibawa ke Australia dan diproses di daratan Australia. Mereka yang ditemukan sebagai pengungsi harus dimukimkan kembali di Australia, dan mereka yang tidak dinilai sebagai pengungsi harus kembali ke negara asalnya (Doherty 2016).

Berdasarkan hasil dari jajak pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka berbeda. Masyarakat Australia bersifat positif terhadap pengungsi dibanding pencari suaka. Dibuktikan dengan hasil 22% bahwa pencari suaka yang tiba di Australia dengan kapal tidak boleh diijinkan datang ke Australia dalam kondisi apapun. Dan 35% berpendapat bahwa pencari suaka harus dikirim ke kamp-kamp di luar negeri untuk diproses, namun yang ditemukan sebagai pengungsi harus dipindahkan ke Australia, dan mereka yang tidak memiliki klaim perlindungan yang sah kembali ke negara asalnya.

Organisasi Internasional terhadap Kebijakan PNG Solution

Faktor eksternal seperti yang terdapat pada konsep Internal-eksternal Setting yaitu lingkungan dan sumber daya alam, kebudayaan negara lain, masyarakat negara lain, dan organisasi internasional, tidak memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan PNG Solution.

Amnesti Internasional, sebagai salah satu organisasi internasional yang bertujuan menegakkan instrumen hak asasi manusia, sering memberikan kritik maupun rekomendasi terhadap pemerintah, mengenai tindakan pemerintah terhadap pencari suaka yang tiba di Australia. Dr. Graham Thom, Koordinator Pengungsi Amnesty International Australia, mengkritik langkah pemerintah yang dinilai tidak membuat kebijakan pencari suaka yang lebih baik dari sebelumnya. Amnesti Internasional juga memberikan beberapa rekomendasi terhadap pemerintah, diantaranya meninjau kembali Pengaturan Pemukiman Daerah dengan Papua Nugini dan mengakhiri pengolahan lepas pantai dan penahanan pencari suaka di lepas pantai, mentransfer semua pencari suaka yang berada di pusat penahanan Pulau Manus ke wilayah Australia dan memberi mereka akses penuh untuk mengikuti prosedur penerimaan suaka di Australia, dan menghapus semua hukuman dan sifat diskriminatif pada kebijakan suaka yang berfokus pada jenis kedatangan menggunakan kapal (Amnesti Internasional 2013, p. 96). Namun, beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Amnesti Internasional kepada Pemerintah Australia tersebut tidak ada yang diimplementasikan. Pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Kevin Rudd tetap melaksanakan perjanjian Regional Resettlement Arrangement dengan Papua New Guinea. Pencari suaka yang telah berstatus pengungsi pun akan tetap ditempatkan di Papua New Guinea, dan tidak akan pernah ditempatkan kembali di wilayah Australia. Maka dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional yaitu Amnesti Internasional tidak berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan Pemerintah Australia terkait permasalahan pencari suaka.

Tidak hanya Amnesti Internasional, UNHCR juga mengkritik kebijakan baru yang diterapkan oleh Australia dalam menangani pencari suaka yaitu PNG Solution. Kebijakan ini dikatakan tidak memiliki standar perlindungan bagi pencari suaka. Ribuan pencari suaka berusaha mencapai Australia dengan perahu setiap tahunnya. Menurut PBB, saat ini Papua New Guinea tidak siap untuk menerima para pencari suaka karena tidak adanya kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan, kondisi fisik yang buruk (BBC Indonesia 2013). UNHCR juga mengatakan bahwa pihaknya (Australia) tidak berkonsultasi mengenai pengaturan tersebut dan kemudian menyatakan bahwa kebijakan pencegahan tersebut gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi orang-orang yang mencari suaka berdasarkan Hukum Internasional (The Guardian 2013).

Dengan demikian, dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Australia mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor. Seperti yang disebutkan dalam hipotesis awal,

faktor yang mempengaruhi ada dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan yaitu Partai Buruh sebagai partai pendukung Kevin Rudd, karakteristik situasional Australia seperti gelombang kedatangan pencari suaka yang cukup tinggi, jumlah orang yang berada dalam tahanan imigrasi yang terus bertambah dan bencana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, serta faktor opini publik Australia terhadap isu pencari suaka. Sementara itu, faktor eksternal yaitu Amnesty Internasional dan UNHCR sebagai organisasi internasional tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan kebijakan. Jadi, Pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Kevin Rudd dalam mengeluarkan kebijakan PNG Solution lebih dominan dipengaruhi oleh faktor internal dari Australia. Sementara faktor eksternal tidak memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Kesimpulan

Pada masa pemerintahan Kevin Rudd, dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia, pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan PNG Solution, yang bekerja sama dengan Papua New Guinea. Kebijakan PNG Solution ini merupakan kebijakan yang keras terhadap pengungsi dan pencari suaka, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan isi Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan konvensi hak asasi manusia lainnya dalam hal perlindungan pengungsi yang mencari suaka, serta jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental bagi pengungsi tanpa diskriminasi atau hukuman. Tidak hanya itu, kebijakan ini tidak melewati prosedural suaka tertentu bagi pencari suaka yang akan mencari suaka di Australia. Pengungsi yang dimukimkan kembali di Papua New Guinea akan menghadapi masa depan dengan standar perlindungan hak asasi yang lebih rendah daripada apa yang akan mereka dapatkan jika dipindahkan ke Australia, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan kesejahteraan.

Dalam mengeluarkan kebijakan PNG Solution tersebut, Pemerintah Australia mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor. Faktor internal lebih dominan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Sementara faktor eksternal, tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Faktor internal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut di antaranya adalah faktor perspektif aktor yang dipengaruhi oleh partai pendukung Kevin Rudd yaitu Partai Buruh, karakteristik situasional Australia dalam pengambilan kebijakan, dan formasi opini publik Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka. Hal ini menunjukkan bahwa, suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan tidak selalu dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal. Faktor internal dari dalam negara sendiri bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengeluarkan kebijakan.

Referensi

- ABC Radio Australia 2013, *PM Kevin Rudd Rombak Kebijakan Pencari Suaka*, 18 Juli, dilihat 31 Januari 2018,
<<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-07-18/pm-kevin-rudd-rombak-kebijakan-pencari-suaka/1163002>>
- Amnesty International Publications 2013, *This is Breaking People: Human Rights Violations at Australia's Asylum Seeker Processing Centre on Manus Island, Papua New Guinea*, Amnesty International, United Kingdom.
- Archbold, Lisa Jane 2015, 'Offshore Processing of Asylum Seekers – Is Australia Complying With It's International Legal Obligatios?', *QUT Law Review*, vol. 15 , issue 1, pp. 137-158.

- BBC Indonesia 2013, *Dua Tewas dalam Kecelakaan Kapal Pencari Suaka di Australia*, 25 Maret, dilihat 31 Januari 2018, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/03/130325_australia_kapal_suaka>
- BBC Indonesia 2013, 'UNHCR Kritik Australia Menangani Pencari Suaka', 26 Juli, dilihat 30 Agustus 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australia>
- BBC News 2013, *Australia PM Kevin Rudd Defends PNG Asylum Deal*, 22 Juni, dilihat 28 Januari 2018, <<http://www.bbc.com/news/world-asia-23371108>>
- Crowe, David & Callick, Rowan 2013, 'Kevin Rudd Unveils 'hard-line' PNG Solution for Asylum-Seekers' *The Australian*, 1 Juli, dilihat 28 Januari 2018, <<https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/immigration/kevin-rudd-to-unveil-manus-island-expansion-plan-in-bid-to-stop-boats/news-story/c8abc607070875a4788c16ed246c153d?sv=8731794f7b109d5f0dfcd94444eaa-d9d>>
- Department of Immigration and Citizenship 2013, *Immigration Detention Statistics Summary: 30 June 2013*, dilihat 09 Februari 2018, <<https://www.homeaffairs.gov.au/ReportsandPublications/Documents/statistics/immigration-detention-statistics-june2013.pdf>>
- Doherty, Ben 2016, 'Majority of Australians Say Refugees Who Arrive by Boat Should be Let In, Poll Finds' *The Guardian*, 28 Juni, dilihat 06 Februari 2018, <<https://www.theguardian.com/australia-news/2016/jun/29/majority-of-australians-say-refugees-who-arrive-by-boat-should-be-let-in-poll-finds>>
- Hartley, Lisa K. & Pedersen, Anne 2015, 'Asylum Seekers and Resettled Refugees in Australia: Predicting Social Policy Attitude From Prejudice Versus Emotion', *Journal of Social and Political Psychology*, vol.3(1), pp. 179-476
- Herdianzah, Muhammad Rifqi n.d, 'Kebijakan Pemerintah Australia Terkait Permasalahan Irreguler Maritime Arrivals' *Periode Kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard Tahun 2010-2012*, susa
- Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951
Labor's National Platforms
- Maajid, Ahmad Lutfhi 2015, *Indonesia di Persimpangan Jalan Merespon Kebijakan 'Turn Back the Boats' Australia*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Marcus, Andrew 2013, 'Election 2013 Issues: What Do We Look Like?' *Monash University*, 12 Agustus, dilihat 25 Februari 2018, <<https://arts.monash.edu/news/election-2013-issues-what-do-we-look-like/>>
- McAdam, Jane 2013, 'Australia and Asylum Seekers', *International Journal of Refugee Law*, vol.25, no.3, pp. 435-448.
- Mercer, Phil 2013, 'Australia Khawatir Semakin Banyak Perahu Pengungsi Berdatangan' *VOA*, 12 April, dilihat 31 Januari 2018, <<https://www.voaindonesia.com/a/australia-khawatir-semakin-banyak-perahu-pengungsi-datang/1639699.html>>
- Stevenson, Brian J.R. 2000, *Canada, Latin America, and The New Internationalism: A Foreign Policy Analysis*, McGill-Queen's Press.
- The Guardian 2013, '*PNG solution' challenge launched in federal court*', 19 Agustus, dilihat 31 Agustus 2017, <<https://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/federal-court-challenge-png-solution>>